
Analisis *Corporate Governance* Pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Mandiri Medan dalam Meningkatkan Nasabah

Fika Yusti Harahap
Universitas Sumatera Utara
fikayusti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis *Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Mandiri yang beroperasi di Medan dalam meningkatkan Nasabah. Metode penelitian yang dipakai itu metode penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif (*descriptive survey research*). Adapun yang akan diteliti yakni tata kelola perusahaan yang terdiri atas 5 dimensi yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung jawab, kemandirian dan keadilan. Adapun setelah dianalisis maka peneliti melihat bahwa *Corporate Governance* sudah cukup baik dan nasabah bisa meningkat karena tata kelola perusahaan pada Bank Perkreditan Rakyat juga meningkat.

Keyword : Analisis, *Corporate Governance*, Bank

I. PENDAHULUAN

Adanya tingkat persaingan antar perusahaan membuat berbagai perusahaan berusaha memperbaiki kualitas dan meningkatkan kebutuhan perusahaan sehingga dapat menang dan unggul dalam bersaing (*competitive advantage*), sehingga pasar yang dimilikinya bisa dipertahankan dan bahkan diperluas. Keunggulan bersaing bisa dipahami pada atribut dan sumber daya pada sebuah organisasi yang mungkin bisa unggul atas usaha orang lain, terutama terkait industri yang sama (Christensen dan Fahey, 1984). Keunggulan itu seperti membuat nilai (*value*) pada produk yang ditampilkan untuk pelanggan dan lainnya. Adapun aktivitas yang dibuat untuk ciptakan sesuatu yang bisa dikelola secara baik dan benar agar prosesnya dapat bernilai dan berjalan dengan baik, sehingga bisa jadi efisien dan efektif dan juga tujuan yang diinginkan perusahaan bisa tercapai.

Pengelolaan aktivitas yang efisien dan efektif ini akan memungkinkan perusahaan memperoleh kinerja usaha yang baik. Apalagi tata kelola perusahaan (*corporate governance*) begitu menarik untuk dibahas terutama pada konteks praktik di perusahaan modern maupun juga perusahaan perbankan. Tata kelola perusahaan memiliki kaitan pada akuntabilitas. Jika tata kelola perusahaan dilakukan dengan baik maka akan diperoleh manfaat dari praktek tata kelola yang baik dan bisa menjadi lebih perhatian, sebab begitu banyaknya terjadi skandal kerugian di berbagai perusahaan terutama perusahaan perbankan yang melibatkan penipuan akuntansi yang dilakukan sehingga membuat kerugian yang semakin membengkak dan menjatuhkan keuntungan perusahaan itu.

Corporate governance definisinya secara umum yakni seperangkat peraturan yang berisi ketentuan hubungan baik itu pada pemegang sahamnya, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan bahkan pemegang kepentingan pada intern dan ekstern dan di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban mereka. Hal ini bisa disebut sebagai sistem yang mengarahkan bahkan memberi kendali atas perusahaan. Adapun Bank Dunia sebagaimana dijelaskan oleh (Tunggal dan Widjaja, 2002) bahwa *corporate governance* ini kumpulan yang berisi hukum, peraturan dan kaidah yang harus dipenuhi dan mendorong kinerja perusahaan menjadi efisien, kemudian hasilkan nilai ekonomi berskala panjang untuk para pemegang agar berkesinambungan dalam memainkan saham maupun masyarakat sekitar yang dilakukan secara menyeluruh.

Corporate governance ini memiliki dua kategori, yang pertama, cenderung akan serangkaian pola perilaku pada sebuah perusahaan yang bisa diukur sesuai dengan kinerja, struktur pembiayaannya, perlakuannya dan bahkan pertumbuhan yang diketahui oleh para pemegang saham, dan *stakeholders*. Kategori yang kedua, melihat pada kerangka yang sifatnya normatif, karena ketentuan hukumnya baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan dan lainnya bisa pengaruhi perilaku perusahaan.

Corporate Governance ini awal mulanya dibicarakan dan diterapkan pada negara-negara benua Asia. Apalagi *Corporate Governance* ini memiliki tujuan agar krisis yang melanda sebagian besar wilayah dunia terutama Asia Timur termasuk Indonesia di bidang fundamental yang memiliki struktur ekonomi bisa diatasi. Saat itu krisis juga terjadi karena adanya aspek internal karena pengawasan yang kurang di lembaga perusahaan tersebut. Masalah lain sebab keputusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan salah sehingga menyebabkan kerugian yang berujung kebangkrutan (Harahap, 2003).

Adapun (Daniri, 2006) menyebutkan bahwa saat itu krisis ekonomi terjadi sebab lemahnya prinsip *Corporate Governance* yang diterapkan oleh perusahaan

terutama perusahaan perbankan. Sedangkan (Herwidayatmo, 2000) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya krisis di Indonesia pengawasan yang lemah sering dilakukan direksi perusahaan, padahal seharusnya hal itu tanggung jawab dari Dewan Komisaris agar perusahaannya terselamatkan dari penggelapan dana.

Setiap pengelolaan keuangan sering terdapat skandal, hal ini bahkan juga berlaku pada perusahaan besar, sehingga para investor diingatkan untuk lebih berhati-hati sebab bahaya lebih besar akan terjadi terhadap perusahaan, apalagi jika perusahaan itu masih tergolong ukuran yang lebih kecil, sebab perusahaan yang lebih kecil pasti ada tata kelola yang tidak baik. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) seharusnya memiliki proses yang baik bahkan terstruktur sehingga bisa dipakai untuk mengarahkan dan bahkan bisa kelola bisnis dan urusan perusahaan, yang bertujuan meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun utama menciptakan nilai itu untuk pemegang saham agar bisa tetap perhatikan kepentingan para *stakeholders*.

Perusahaan yang baik tentunya juga dikelola dengan baik dan selayaknya harus terapkan empat prinsip tata kelola yang baik, yakni: Tanggung jawab (*responsible*), Akuntabilitas (*Accountability*), Keadilan (*Fairness*) dan Keterbukaan (*Transparency*). Keempat komponen penting sebab pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* nya dilakukan dengan konsisten, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi meningkat dan menjadi penghambat aktivitas rekayasa nilai fundamental perusahaan.

Lembaga perbankan menjadi suatu lembaga keuangan penting sebab memiliki nilai yang sangat strategis agar perekonomian suatu negara bisa berjalan dengan baik. Lembaga tersebut memiliki maksud untuk perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) maupun dengan pihak-pihak yang kekurangan dana sehingga sangat butuh suntikkan dana (*lack of fund*). Adapun semua ini mengandung resiko pada perbankan itu sendiri. Untung saja adanya Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 membuat Bank Indonesia menjadi serius dalam memperkatikan pengelolaan perusahaan untuk Bank Umum.

Pada Tahun 2013 yang mana saat itu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengajak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar bisa tingkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam banknya. Apalagi hal ini sebab karena banyaknya kasus BPR yang ditutup sebab tata kelola perusahaan di BPR yang tidak berkualitas. Bahkan sampai akhir tahun 2014, ada 59 BPR yang telah ditutup dari jumlah keseluruhan 1.640 BPR yang ada di Indonesia. Banyaknya BPR yang dilikuidasi tentu saja membuat kepercayaan masyarakat untuk jasa keuangan BPR jadi berkurang sehingga

berdampak pada jasa keuangan BPR Dana Mandiri yang ada di Medan. Perkara itu juga bisa turunkan keunggulan bersaing BPR atas lembaga keuangan lainya yang memberikan jasa keuangan yang sama. Hal ini lah yang menyebabkan peneliti ingin meneliti tentang **Analisis Corporate Governance Pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Mandiri Medan dalam Meningkatkan Nasabah**

II. LITERATURE REVIEW

A. Corporate governance

Beberapa ahli mengemukakan pengertian *corporate governance*. Adapun Maati, (1999) menjelaskan bahwa *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai seluruh rangkaian tindakan yang diambil dalam entitas sosial pada sebuah perusahaan agar mendukung pelaku ekonomi mengambil bagian untuk membuat perusahaan itu menjadi produktif, sehingga menghasilkan beberapa surplus organisasi. *Corporate governance* ini juga mengatur distribusi yang adil yang ada diantara mitra, lalu melakukan pertimbangan tentang kontribusi mereka untuk perusahaannya.

Ahli lain yakni (Monks dan Minow, 2004) memberikan pernyataan *Corporate governance* ini merupakan hubungan antara berbagai peserta agar bisa tentukan arah dan kinerja perusahaan tersebut”. Bisa dipahami bahwa *corporate governance* ini memiliki proses dan struktur yang dipakai untuk arahkan juga lakukan kelola bisnis pada urusan perusahaan agar bisa tingkatan bisnis menjadi lebih makmur, terbuka dan akuntabilitas. Adapun tujuan utamanya agar nilai-nilai pemegang saham dalam jangka panjang bisa tetap diperhatikan agar kepentingan para konstituen *stakeholders* terpenuhi.

Ada dua hal yang ditekankan pada konsep ini, pertama, pemegang saham memiliki hak penting untuk mendapatkan informasi dengan benar dan akurat sesuai dengan waktunya terkait perkembangan perusahaannya; kedua, adanya kewajiban perusahaan untuk mengungkap (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan atas informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* agar tidak ada pihak yang bisa dirugikan.

B. Prinsip dan Penerapan Corporate Governance

Prinsip dasar *Corporate Governance* yang dikembangkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2015) ada memiliki yaitu ada empat prinsip dasar yang harus dipenuhi sehingga dapat berjalan dengan baik, yakni: Tanggung jawab (*responsible*), Akuntabilitas (*Accountability*), Keadilan (*Fairness*) dan Keterbukaan (*Transparency*). agar memiliki tujuan untuk

memberikan kemajuan akan kinerja perusahaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab. Tanggung jawab ini acuannya untuk mengakui hak semua pemangku kepentingan seperti yang disediakan oleh hukum dan juga kerja samanya harus lebih ditingkatkan menjadi lebih aktif diantara perusahaan dan pemangku kepentingan utama. (Sudarsono dkk,2006:3). Selain itu tanggung jawab untuk hak-hak pemegang saham yang meliputi hak dasar pemegang saham untuk dapat keamanan saat melakukan pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, hak dapatkan informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, hak untuk miliki peran untuk bersuara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak memilih anggota dewan komisaris dan direksi, dan bahkan hak pembagian keuntungan perusahaan/dividen.
2. Keadilan (*Fairness*). Keadilan ini ditujukan agar perusahaan bertindak adil kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2015) Persamaan perlakuan pemegang saham sehingga memiliki kesempatan untuk melakukan penggantian atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Selain itu memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* sebagaimana undang-undang telah mengaturnya dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* sehingga tercipta lapangan kerja yang mensejahterakan masyarakat.
3. Keterbukaan dan Transparansi (*Transparency*). yang harus dikedepankan agar adanya pengungkapan yang tepat waktu secara akurat dan terjamin agar setiap permasalahan terkait perusahaan bisa diselesaikan dan harus disusun, diaudit bahkan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.
4. Akuntabilitas (*Accountability*). Akuntabilitas inilah yang menentukan keadaan *stakeholder* yang memiliki akses yang memadai, akurat, dimengerti, dan *up to date* akan informasi yang menjadi dasar dari tindakan para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris (*Board of Directors*) harus menjamin akuntabilitas sesuai dengan pedoman strategis perusahaan. Adanya pemantauan yang efektif terhadap manajemen bisa dilakukan dewan komisaris serta akuntabilitas dewan komisaris atas perusahaan dan tentunya kepada pemegang saham.

Penerapan *Corporate Governance* menjadi suatu tuntutan sehingga perusahaan terhindar persaingan global yang semakin keras. Apalagi prinsip-prinsip dasar dari GCG mempunyai tujuan memajukan kinerja suatu perusahaan yang lebih kepada serangkaian pola perilaku perusahaan karena diukur sesuai kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaannya agar para pemegang saham dan juga

stakeholders bisa membuatnya menjadi dasar analisis untuk melakukan pengkajian *corporate governance* pada suatu perusahaan sehingga memenuhi transparansi dan akuntabilitas saat mengambil keputusan yang sistematis untuk mengukur kinerja perusahaan dengan lebih akurat.

Penerapan *Corporate Governance* saat sebuah perusahaan dijalankan memiliki harapan mampu melakukan kinerja yang lebih baik buat perusahaan sehingga lebih transparan untuk memaparkan informasi yang dibutuhkan oleh pasar. Adapun (Siagian, 2011) ternyata memprediksi *Corporate Governance* bisa meminimalisir *Agency Problem* yang ada pada perusahaan. *Corporate Governance* diharapkan bisa tingkatkan komunikasi antara manager dan para pemegang saham. *Corporate Governance* diharapkan membuat dewan komisaris dan direksi dan komite-komite independen bisa lebih berperan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

C. Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

(Sutojo dan Aldridge, 2005) menjelaskan bahwa *corporate governance* mempunyai lima macam tujuan utama, yakni:

1. Melindungi hak bahkan kepentingan pemegang saham;
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham;
3. Meningkatkan nilai perusahaan juga untuk pemegang sahamnya;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaannya;
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Menurut (Daniri, 2006), manfaat *corporate governance*, yakni:

1. Adanya kinerja perusahaan yang semakin meningkat karena adanya supervisi dan dilakukannya pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen pada pemangku kepentingan lainnya yang tentunya sesuai kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
2. Merancang kerangka acuan yang membuat pengawasan bisa berjalan efektif agar tercipta mekanisme *checks and balances* pada perusahaan.
3. *Agency cost* bisa semakin ditingkatkan karena biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebab adanya pendelegasian.

III. METHOD

A. Research Design

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. (Maloeng, 2012).

Metode kualitatif ini peneliti pakai agar bisa menyesuaikan kondisi disaat berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini juga memberikan hakikat yang terkait antara peneliti dan responden secara langsung dikarenakan metode ini lebih membuat peneliti untuk menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. (Ahmad Tanzeh dan Suyitno, 2006)

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual serta sifat-sifat dari suatu populasi tertentu. (Zuriah, 2009).

Penelitian ini berusaha memaparkan suatu gejala ataupun keadaan secara sistematis sehingga subjek penelitian menjadi lebih jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis *Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Mandiri yang beroperasi di Medan dalam meningkatkan Nasabah. Sesuai dengan tujuan penelitian nya pendekatan ini mengungkap fakta baik lisan maupun tulisan dari berbagai sumber data yang didapatkan dari partisipan yang selanjutnya diuraikan dengan jelas dan ringkas.

B. Sumber Data

Sumber data menurut (Arikunto, 2006) yaitu subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara. maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi: 1. Data Primer. Data itu diambil dari sumber pertama di lapangan (Bugin, 2001). Data primer penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung; 2. Data sekunder. Datanya di dapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder. Datanya juga telah dikumpulkan oleh pihak lain pada saat penelitian dilakukan. (Bugin, 2001) Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumentasi Bank seperti struktur organisasinya dan juga nasabahnya. Selain itu data sekunder diambil dari sumber-sumber pustaka yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian; Kemudian metode interview yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya; terakhir dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. (Arikunto, 2006)

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis analisis data studi kasus. Dimana dalam analisis studi kasus peneliti mencoba menggambarkan subjek penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku beserta hal-hal yang melatarbelakanginya, hubungan antara tingkah laku dengan riwayat timbulnya tingkah laku dan yang berkaitan dengan tingkah laku.

IV. DISCUSSION

Berdasarkan analisis peneliti bahwa pelaksanaan tata kelola yang dilakukan BPR Dana Mandiri Medan sudah baik, apalagi aspek tata kelola yang pelaksanaannya begitu baik pada aspek bertanggung jawab. BPR Dana Mandiri Medan sangat bertanggung jawab mengelola dana kredit masyarakat sehingga Nasabah percaya dengan kinerja mereka. Namun sangat disayangkan ada beberapa responden yang kecewa pada sisi aspek akuntabel. BPR Dana Mandiri Medan ini harus memperbaiki aspek akuntabel mereka dengan memilih akuntan yang lebih naik dalam perhitungan, agar kesalahan dalam penghitungan keuangan tidak terjadi. Menurut jawaban responden, keunggulan bersaing yang dimiliki oleh BPR Dana Mandiri Medan dikategorikan baik terutama pada aspek kepemimpinan biaya yang walaupun pada aspek diferensiasi produknya harus lebih diperbaiki lagi.

Menurut pengamatan peneliti, *Corporate governance* pada BPR Dana Mandiri Medan membuat kinerja perusahaan menjadi meningkat, apalagi BPR Dana Mandiri Medan telah membuat supervisi dan melakukan pemantauan kinerja manajemen dan BPR Dana Mandiri Medan juga semakin memperbaiki akuntabilitas manajemen pada pemangku kepentingan lainnya yang tentunya sesuai kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Kerangka acuan untuk melakukan pengawasan telah dibuat dan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* pada perusahaan BPR Dana Mandiri Medan. Selain itu *Agency cost* telah ditingkatkan. Hal ini yang sudah mereka lakukan dalam upaya meningkatkan nasabahnya. Hasilnya Nasabah pada BPR Dana Mandiri Medan ini meningkat dratis.

V. CONCLUSION

Pelaksanaan tata kelola yang dilakukan BPR Dana Mandiri Medan sudah baik, apalagi aspek tata kelola yang pelaksanaannya begitu baik pada aspek bertanggung jawab. BPR Dana Mandiri Medan sangat bertanggung jawab mengelola dana kredit masyarakat sehingga Nasabah percaya. Adapun *Corporate governance* pada BPR Dana Mandiri Medan membuat kinerja perusahaan menjadi meningkat.

REFERENCES

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bugin, B. (2001). *Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Christensen, K. and Fahey, L. (1984), “*Building Distinctive Competences Into Competitive Advantage*”, *Strategic Planning Management*, February.
- Daniri. (2006). *Manfaat Good Corporate Governance*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, S. S. (2003). *Teori Akuntansi*. Edisi Kelima, Jakarta: PT. Rasmindo.
- Herwidayatmo. (2000). *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik di Indonesia*. Jurnal Usahawan No. 10 TH XXIX Oktober.

- Maati, J. (1999), *Le Gouvernement d'Entreprise*, De Boeck Universite, Paris and Bruxelles.
- Maloeng, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Monks, R. and Minow, N. (2004), *Corporate Governance*, Cambridge: Blackwell Business
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors.
- Siagian, F. et.,al. (2011). *Corporate Governance, Reporting Quality, and Firm Value: Evidence from Indonesia*. Emeraldinsight. Journal of Accounting In Emerging Economies Volume 3, Issue 1
- Tanzeh. Ahmad dan Suyitno. (2006). *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: eLKAF.
- Tunggal. I. S. dan Widjaja. A. (2002). *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. cet. 1. Jakarta: Harvarindo.
- Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.